

Judul : Siaga hadapi bencana, tim Basarnas butuh dukungan peralatan
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Siaga Hadapi Bencana Tim Basarnas Butuh Dukungan Peralatan



Erna Sari Dewi

ANGGOTA Komisi V DPR Erna Sari Dewi mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan rencana kerja anggaran secara cermat. Hal itu agar program kerja kedua lembaga langsung menyentuh kebutuhan publik.

Secara khusus Erna menyoroti sisa anggaran belanja modal Basarnas yang terlampau minim.

roti sisa anggaran belanja modal Basarnas yang terlampau minim. Alokasi anggaran yang diberikan harusnya sebanding dengan besarnya risiko tugas dan tanggung jawab penanggulangan dampak bencana di lapangan.

Menurutnya, pemenuhan fasilitas penunjang dan peralatan taktis operasional penyelamatan belum mendapat porsi anggaran memadai, bahkan ada yang masih nol. "Termasuk pengadaan kapal SAR kelas 2 dan kelas 5, masih nihil," ujarnya saat raker Komisi V DPR dengan Basarnas dan BMKG di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Karena itu, dia meminta perhatian khusus agar peralatan strategis berupa *drone Unmanned Aerial Vehicle* dan radar locator segera dianggarkan. Keselamatan rakyat tidak boleh dibebankan kepada Basarnas tanpa adanya dukungan peralatan yang memadai serta berfungsi dengan baik dalam menunjang operasi di lapangan.

Untuk BMKG, Erna memin-

ta lembaga itu mengoptimalkan anggaran. Khususnya untuk mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan fenomena alam jangka panjang seperti El Nino. "Ketahanan pangan nasional sangat terdampak fenomena itu sehingga penguatan sistem peringatan dini di daerah pesisir harus dilakukan," ingatnya.

Senada, anggota Komisi V DPR Ghufuran mendorong BMKG serta Basarnas memprioritaskan penguatan layanan dan kesiapsiagaan di wilayah berkategori kerawanan bencana tinggi. Optimisme terkait pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kedua lembaga itu tetap ada mengingat peran strategis yang mereka miliki.

Pengalokasian sumber daya, kata Ghufuran, harus mempertimbangkan peta kerawanan bencana nasional yang komprehensif. Daerah-daerah yang secara historis dan geografis memiliki risiko tinggi, dari Aceh sampai Papua harus memiliki risiko tinggi, dari Aceh sampai Papua harus mendapatkan perhatian utama. "Baik pada aspek infrastruktur, peralatan, maupun kesiapan personel," ucapnya.

Berikutnya, Ghufuran juga menyoroti evaluasi terhadap kondisi seluruh peralatan yang digunakan BMKG dan Basarnas. Kebutuhan modernisasi serta pembaruan alat harus masuk dalam perencanaan anggaran ke depan agar tidak ada fasilitas yang tidak berfungsi saat terjadi kondisi darurat bencana.

Ghufuran berharap, Pemerintah memberikan dukungan anggaran memadai bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas mitigasi, peringatan dini, serta pencarian. Pihaknya mendukung penuh agar semua kebutuhan anggaran itu bisa terpenuhi secara menyeluruh pada tahun anggaran 2027.

Penguatan kapasitas BMKG dan Basarnas, sambungnya, merupakan investasi untuk mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana. ■ PYB